

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Hak Kepemudaan

#### 1. Pengertian Hak Pemuda

Pemuda adalah individu yang sedang mengalami perkembangan fisik dan emosional, merupakan sumber daya manusia yang akan membangun masa depan, menggantikan generasi sebelumnya. Mereka memiliki karakter dinamis, optimis, namun belum sepenuhnya mengendalikan emosi. Menurut KBBI, pemuda adalah laki-laki muda yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa, sementara pemudi adalah perempuan muda yang juga turut berperan aktif. Mereka dapat juga diidentifikasi sebagai jemaat laki-laki dan perempuan yang telah melewati masa remaja namun belum menikah.

Ada berbagai definisi tentang pemuda, baik dari segi fisik maupun psikis, yang mencoba menjelaskan siapa yang dapat disebut sebagai pemuda dan apakah pemuda selalu dikaitkan dengan semangat dan usia. Taufik Abdulah (1974:6) menyatakan bahwa pemuda adalah individu yang memiliki karakter dinamis, bahkan cenderung bergejolak dan optimis, tetapi belum memiliki kendali emosi yang stabil. Pemuda mengalami masa perubahan sosial dan budaya. Princeton dalam kamus Webster mendefinisikan kata "youth" (pemuda) sebagai " the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person".<sup>12</sup>

Menurut WHO ( World Health Organization) dalam karya Sarlito Sarwono (2008:9), rentang usia 10-24 tahun

---

<sup>12</sup> Herliansyah, A. R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 212-221.

diklasifikasikan sebagai "young people," sementara masa remaja atau "adolescence" adalah dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Mukhlis (2007:1), pemuda merupakan generasi yang bertanggung jawab atas berbagai harapan, terutama dari generasi sebelumnya. Hal ini karena pemuda dianggap sebagai generasi penerus yang harus meneruskan dan melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan<sup>13</sup>.

Pemuda sering juga disebut sebagai agen perubahan karena mereka memiliki semangat perjuangan yang tinggi dan potensi yang dapat dikembangkan. Beberapa potensi yang dimiliki oleh generasi muda dan perlu terus ditingkatkan adalah sebagai berikut.

a. Idealisme dan kemampuan kritis. Secara sosial, pemuda sering dianggap belum stabil.

Dalam struktur yang ada, sehingga mereka mampu melihat kelemahan dalam sistem dan menghasilkan ide-ide baru. Kemampuan berpikir kritis harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab yang seimbang.

b. Dinamika dan kreativitas. Generasi muda memiliki idealisme yang membuat mereka.

Memiliki potensi kreativitas yang dinamis. Ini berarti mereka memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbarui sistem yang ada dan mengusulkan ide-ide baru.

c. Pemuda memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Meskipun perubahan dan inovasi.

Dapat berisiko, risiko diperlukan untuk kemajuan. Oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki pengetahuan,

---

<sup>13</sup> Ningtyas, A. S., & Santosa, B. (2019). Minat Pemuda Pada Pertanian Hortikultura Di Desa Kelor Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Development and Social Change*, 2(1), 49-60.

perhitungan, dan keterampilan untuk menghasilkan kualitas terbaik dan berani mengambil risiko.

- d. Optimisme dan semangat yang tinggi. Optimisme dan semangat yang tinggi mendorong.

Generasi muda untuk tetap bersemangat dan terus berusaha maju meskipun menghadapi rintangan.

- e. Sikap mandiri dan disiplin yang berani. Kemauan untuk bertindak secara mandiri.

Potensi yang dimiliki generasi muda. Namun, sikap mandiri harus diimbangi dengan disiplin yang murni, sehingga mereka memahami batasan yang wajar dan memiliki rasa tanggung rasa.

## 2. Kedudukan hak kepemudaan

Kedudukan hak kepemudaan merujuk pada posisi, pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak yang melekat pada pemuda dalam masyarakat. Ini mencakup hak-hak yang diberikan kepada pemuda sebagai anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan, aspirasi, dan potensi khusus yang perlu diakui dan dilindungi oleh negara serta masyarakat secara keseluruhan. Kedudukan hak kepemudaan melibatkan berbagai aspek, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, akses terhadap pekerjaan yang layak, kesehatan yang memadai, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kebebasan berekspresi, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta pengakuan terhadap identitas budaya dan sosial mereka.<sup>14</sup>

Kedudukan hak kepemudaan merujuk pada posisi atau status hukum dan sosial dari hak-hak yang melekat pada

---

<sup>14</sup> Haifarashin, R., & Dewi, D. A. (2022). Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3974-3980.

pemuda dalam suatu masyarakat. Beberapa kedudukan hak kepemudaan meliputi:

- a. Hak Asasi Manusia (HAM) : pemuda memiliki hak-hak yang sama seperti manusia lainnya dan bahwa hak-hak ini harus diakui, dihormati, dan dilindungi. Pemikiran ini menempatkan pemuda sebagai subjek yang memiliki martabat inheren dan hak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan.
- b. Partisipasi Politik : pentingnya partisipasi pemuda dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan hak untuk menyuarakan pendapat, berorganisasi, memilih dan dipilih, serta berpartisipasi dalam institusi politik. Keterlibatan pemuda dianggap penting untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
- c. Pembangunan Berkelanjutan : pemuda adalah aset penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hak kepemudaan dipahami sebagai bagian integral dari upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
- d. Teori Keadilan dan Kesetaraan : Pendekatan ini menekankan pentingnya mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, termasuk pemuda. Hak kepemudaan dilihat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.
- e. Teori Multikulturalisme : Pendekatan ini menyoroti pentingnya menghargai keragaman budaya dan identitas pemuda. Hak kepemudaan dipahami dalam konteks mengakui dan melindungi hak-hak kelompok-kelompok minoritas serta mempromosikan inklusi sosial dan budaya.
- f. Teori Sosiologis : peran dan posisi pemuda dalam struktur sosial, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi hak-hak

mereka dalam masyarakat. Ini termasuk aspek-aspek seperti status ekonomi, gender, etnis, dan kelas sosial.

Pentingnya kedudukan hak kepemudaan adalah untuk memastikan bahwa pemuda memiliki kesempatan yang sama dan adil dalam mengembangkan diri mereka, berkontribusi dalam masyarakat, dan meraih potensi mereka sepenuhnya. Hal ini juga penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena pemuda sering kali dianggap sebagai agen perubahan yaitu kunci dalam mewujudkan perubahan positif dalam Masyarakat.<sup>15</sup>

### 3. Dasar- Dasar Sanksi Hak Kepemudaan

Dasar-dasar Sanksi Hak Kepemudaan di Indonesia Sanksi hak kepemudaan di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang kuat, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 1) Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
  - 2) Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa "pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional".
  - 3) Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
  - 1) Undang-Undang Kepemudaan mengatur tentang hak dan kewajiban pemuda, serta pengembangan kepemudaan di Indonesia.

---

<sup>15</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009>

- 2) Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Kepemudaan menyatakan bahwa "pelanggar hak kepemudaan dapat dikenakan sanksi".
  - 3) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepemudaan menyebutkan jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan, yaitu teguran lisan atau tertulis, pembatasan hak, dan pencabutan hak.<sup>16</sup>
- c. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kepemudaan Pasal 9 Setiap pemuda berhak mendapatkan:
- 1) Perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
  - 2) Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
  - 3) Advokasi;
  - 4) Akses untuk pengembangan diri;
  - 5) Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
  - 6) Akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
  - 7) Akses membentuk jejaring kemitraan.

Maria Farida Indrati, seorang pakar hukum tata negara ternama di Indonesia, mendefinisikan Peraturan Daerah (Perda) sebagai peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan di atas peraturan desa.<sup>17</sup>

Peraturan Daerah adalah hasil dari proses perundang-undangan di tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota,

---

<sup>16</sup> [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Dasar\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia\\_Tahun\\_1945](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945)

<sup>17</sup> <https://www.mkri.id/index.php?id=9598&menu=2&page=web.Berita>

bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Wewenang daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan secara lebih rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Proses pembentukan Peraturan Daerah bukanlah hal yang sederhana karena membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup, terutama mengenai prosedur teknisnya, sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengakomodasi kepentingan umum.

Peraturan Daerah merupakan hasil dari proses legislasi di tingkat daerah yang melibatkan Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Wewenang daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dijabarkan lebih detail dalam regulasi lainnya. Proses pembentukan Peraturan Daerah bukanlah hal yang mudah karena memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama terkait aspek teknisnya, untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum.

Dalam peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 di jelaskan bahwa Hak- hak yang di berikan kepada pemuda seperti hak untuk mendapatkan Pendidikan, pekerjaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik serta social. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki

kesempatan dan dukungan yang cukup untuk berkembang serta berkontribusi secara positif dalam Masyarakat.<sup>18</sup>

Kesimpulannya, Peraturan Daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Perda harus dibuat dengan cermat dan memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan nasional, aspirasi masyarakat, dan kondisi di daerah.

#### 4. Sanksi Pelanggaran Pemenuhan Hak Kepemudaan

Sanksi pelanggaran pemenuhan hak kepemudaan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun internasional. Berikut beberapa contohnya:

##### a. Tingkat Nasional:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) mengatur tentang hak dan kewajiban pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Kepemudaan : Pasal 36 mengatur tentang sanksi administratif bagi pihak yang dengan sengaja menghalangi-halangi pelaksanaan hak dan kewajiban pemuda. Sanksi administratif ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penghentian sementara atau permanen kegiatan. Pasal 37 mengatur tentang sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja merampas hak dan kewajiban pemuda. Sanksi pidana ini berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan : Pasal 37 mengatur tentang sanksi administratif bagi pihak yang

---

<sup>18</sup> Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96-96.

dengan sengaja menghalangi-halangi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan. Sanksi administratif ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penghentian sementara atau permanen kegiatan. Pasal 38 mengatur tentang sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja merampas hak dan kewajiban pemuda dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan. Sanksi pidana ini berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

b. Tingkat Daerah:

Peraturan Daerah (Perda) tentang kepemudaan : Setiap daerah memiliki peraturan daerahnya sendiri tentang kepemudaan, yang mungkin memuat ketentuan tentang sanksi pelanggaran pemenuhan hak kepemudaan.

c. Tingkat Internasional:

Konvensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa: Konvensi ini mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang universal, termasuk hak-hak pemuda. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak pemuda.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa: Konvensi ini mengatur tentang hak-hak anak, termasuk hak-hak pemuda yang berusia di bawah 18 tahun. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak.<sup>19</sup>

## 5. Pengertian Sanksi Hak Kepemudaan

Sanksi hak kepemudaan adalah langkah atau dampak yang diambil terhadap pemuda atau individu muda dalam masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum atau norma sosial. Sanksi tersebut mungkin berupa pembatasan atas hak-

<sup>19</sup> [https://jdih.kemnaker.go.id/Asset/Data\\_Puu/2023pmnaker005.Pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/Asset/Data_Puu/2023pmnaker005.Pdf)

hak tertentu, seperti kemampuan untuk mengemudi, berpartisipasi dalam pemerintahan, atau memberikan suara, sebagai akibat dari perilaku yang tidak pantas. Tujuan dari penerapan sanksi ini bervariasi, namun umumnya mencakup upaya untuk memberikan pendidikan, rehabilitasi, atau pencegahan guna memungkinkan pemuda yang terlibat untuk belajar dari kesalahan mereka dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab di masa mendatang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Undang-Undang Kepemudaan).<sup>20</sup>

#### 6. Kegunaan Sanksi Hak Kepemudaan

Manfaat Sanksi Hak Kepemudaan di Indonesia memiliki beberapa kegunaan penting dalam konteks pembangunan kepemudaan di Indonesia, yaitu :

- a. Pencegahan Pelanggaran Hak Kepemudaan di Masa Depan: Sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran hak kepemudaan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain, sehingga mendorong mereka untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Tindakan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan kepemudaan di Indonesia.
- b. Rehabilitasi Pelaku Pelanggaran: Sanksi hak kepemudaan dapat difungsikan sebagai alat untuk membantu rehabilitasi pelaku pelanggaran, membantu mereka memperbaiki kesalahan mereka, dan kembali berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Program pembinaan dan rehabilitasi merupakan sarana yang efektif dalam mencapai tujuan ini.

---

<sup>20</sup> Sujana Donandi, S. Kewenangan Memberi Sanksi Administratif Kepada Organisasi Olahraga Di Indonesia (Studi Kasus Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) Versus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Pssi)).

- c. Keadilan bagi Korban Pelanggaran: Penerapan sanksi hak kepemudaan juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran. Ini bisa berarti memberikan kompensasi kepada korban dan mendukung mereka dalam proses pemulihan fisik dan mental setelah mengalami pelanggaran.
- d. Peningkatan Kesadaran akan Hak Kepemudaan: Langkah-langkah penegakan sanksi hak kepemudaan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak pemuda. Melalui edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak pemuda, serta dorongan agar masyarakat melaporkan pelanggaran hak kepemudaan, kesadaran akan hak-hak pemuda bisa ditingkatkan.
- e. Penguatan Penegakan Hukum: Sanksi hak kepemudaan merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum di bidang kepemudaan. Dengan menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten, penegakan hukum dapat diperkuat, dan hak-hak pemuda dapat lebih efektif dilindungi. Melalui pendekatan yang holistik dan berimbang, penerapan sanksi hak kepemudaan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan yang positif bagi generasi muda.<sup>21</sup>

## 7. Tujuan Sanksi Hak Kepemudaan

Tujuan Sanksi Hak Kepemudaan di Indonesia Sanksi hak kepemudaan di Indonesia memiliki beberapa tujuan penting, yaitu :

---

<sup>21</sup> Azkiyah, N. (2023). *Penegakkan peraturan daerah kabupaten brebes tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusi perspektif fikih siyarah* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

- a. Mencegah Pelanggaran Hak Kepemudaan di Masa Depan  
Sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran hak kepemudaan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan orang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di masa depan. Hal ini dapat membantu untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan kepemudaan di Indonesia selain itu tujuan sanksi Hak Kepemudaan adalah merehabilitasi pelaku pelanggaran sanksi hak kepemudaan dapat digunakan sebagai sarana untuk membantu pelaku pelanggaran agar dapat memperbaiki kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program pembinaan dan rehabilitasi.
- b. Memberikan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran sanksi hak kepemudaan dapat membantu untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada korban, serta membantu korban untuk mendapatkan pemulihan fisik dan mental serta meningkatkan Kepedulian Terhadap Hak Kepemudaan penerapan sanksi hak kepemudaan dapat membantu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak pemuda. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak pemuda, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak kepemudaan.

Tujuan sanksi hak kepemudaan juga untuk memperkuat penegakan hukum sanksi hak kepemudaan merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum di bidang kepemudaan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten

dapat membantu untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan bahwa hak-hak pemuda dilindungi.<sup>22</sup>

## **B. Siyasah Dusturiyah**

### **1. Pengertian Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi dasar dasar/pembinaan.

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu, “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun

---

<sup>22</sup> Nggeboe, F., Iswanto, R., & Puspita, S. I. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pemuda Dari Kejahatan Terorisme Di Wilayah Hukum Provinsi Jambi. *Wajah Hukum*, 4(2), 388-397.

seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.

Abul A'la al-Maududi menakrifkan dusturi dengan, "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.

Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135-152.

## 2. Ruang Lingkup Siyasa Dusturiyah

Siyasa Dusturiyah adalah salah satu cabang dari ilmu politik Islam yang berfokus pada aspek-aspek pemerintahan, konstitusi, serta administrasi negara dalam kerangka hukum Islam (syariah). Dalam pandangan ini, siyasa dusturiyah tidak hanya terbatas pada proses politik secara formal, tetapi mencakup aturan-aturan yang menyeluruh mengenai pengaturan negara, mulai dari bagaimana pemerintahan dibentuk, dijalankan, hingga bagaimana negara berinteraksi dengan warganya, termasuk hak-hak warga negara dan kewajiban mereka terhadap negara. Salah satu prinsip utama dalam siyasa dusturiyah adalah konsep keadilan (al-'adl). Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti pemberian hak yang sama, tetapi juga perlakuan yang adil sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan individu serta kelompok dalam masyarakat. Negara, dalam menjalankan tugasnya, harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ajaran Islam, termasuk hak untuk hidup dalam damai, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Siyasa dusturiyah juga mencakup pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pembagian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja,

melainkan tersebar agar dapat menjalankan fungsi check and balance. Prinsip ini terinspirasi oleh ajaran Islam yang menekankan pentingnya musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun dalam masyarakat secara luas.

Dalam konteks modern, konsep syura dapat diimplementasikan melalui sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Siyasah dusturiyah juga mengatur tentang kewenangan pemimpin dalam pemerintahan. Pemimpin dalam Islam, baik itu khalifah, raja, atau presiden, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pemerintahannya berjalan sesuai dengan syariat Islam. Pemimpin harus adil, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip moral yang tinggi. Mereka juga harus mendengarkan masukan dari rakyat, terutama melalui lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menampung aspirasi rakyat, seperti majelis syura atau dewan perwakilan rakyat dalam konteks negara modern. Selain itu, siyasah dusturiyah mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya dalam hal hak dan kewajiban. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap warganya, seperti hak atas perlindungan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Di sisi lain, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara

selama aturan tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dalam hal pembentukan undang-undang, siyasah dusturiyah menekankan pentingnya kesesuaian dengan syariah Islam. Meskipun demikian, dalam konteks modern, terdapat ruang untuk penafsiran dan ijtihad (pemikiran independen) dalam merumuskan hukum-hukum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Negara harus fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Siyasah dusturiyah juga mencakup hubungan internasional.

Negara Islam diharapkan untuk berinteraksi dengan negara-negara lain dengan cara yang damai dan adil. Dalam konteks modern, ini berarti bahwa negara Islam harus aktif dalam diplomasi, menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, serta berusaha menyelesaikan konflik internasional melalui cara-cara damai yang sesuai dengan ajaran Islam. Hubungan ini diatur dengan prinsip-prinsip seperti menjaga kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta menghormati hak asasi manusia. Secara keseluruhan, siyasah dusturiyah memberikan kerangka kerja yang holistik dan komprehensif untuk pengelolaan negara dalam konteks syariah Islam. Ia menawarkan panduan tentang bagaimana negara seharusnya dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab,

dan partisipasi rakyat, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks pemerintahan modern, selama mereka tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Islam yang universal.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Sholahudin, M. A. (2021). Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasaah Maliyah. *Jurnal Perspektif*, 5(2), 161-175.